

# PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Fakultas HukumUPN “Veteran” Jawa timur



OLEH :

DIMAS NURUDDIN MUFTI  
0771010003

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS NURUDDIN MUFTI  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 Agustus 1986  
NPM : 0771010003  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl mayangkara no. 237 kav 622 Gayung Kebonsari  
Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan di cabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Surabaya, 14 Juni 2012

Pembimbing Utama

Penulis

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP. 19 6201212198803 1 001

Dimas Nuruddin Mufti  
NPM.0771010003

# PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA

Disusun oleh

Dimas Nuruddin Mufti  
NPM. 0771010003

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP.19 6201212198803 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn  
NPT.3 7507 07 0225

Mengetahui

DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19 62062199103 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKIRPSI

Judul Penelitian : PELANGGARAN KODE ETIK  
ADVOKAT DALAM PEMBUATAN  
SURAT KUASA

Nama Mahasiswa : Dimas Nuruddin Mufti

NPM : 0771010003

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP.19 6201212198803 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn  
NPT.3 7507 07 0225

Mengetahui

DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19 62062199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI UJIAN SKIRPSI

Judul Penelitian : PELANGGARAN KODE ETIK  
ADVOKAT DALAM PEMBUATAN  
SURAT KUASA

Nama Mahasiswa : Dimas Nuruddin Mufti

NPM : 0771010003

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah dipertahankan dan diterima oleh tim penguji Skripsi program studi ilmu  
hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 16 Juni 2012

menyetujui

Tim penguji

Tanda Tangan

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP.19 6201212 198803 1 001

(.....)

SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19 5105504 198303 1 001

(.....)

HARYO SULISTİYANTORO, SH., MM  
NIP. 19 62062199103 1 001

(.....)

Mengetahui

DEKAN

HARYO SULISTİYANTORO, SH., MM  
NIP. 19 62062199103 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penelitian : PELANGGARAN KODE ETIK  
ADVOKAT DALAM PEMBUATAN  
SURAT KUASA

Nama Mahasiswa : Dimas Nuruddin Mufti

NPM : 0771010003

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah dipertahankan dan diterima oleh tim penguji Skripsi program studi ilmu  
hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 16 Juni 2012

Pembimbing Utama

Tim penguji

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP.19 6201212 198803 1 001

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP.19 6201212198803 1 001

Pembimbing Pendamping

SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19 5105504 198303 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn  
NPT.3 7507 07 0225

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 1962062 199103 1 001

Mengetahui

DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 1962062 199103 1 001

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpah Rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulisan ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadep I sekaligus dosen pembimbing utama yang memiliki empati terhadap peneliti.
3. Bapak Ec. Gendut Sukarno,MS selaku Wadep II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. .
4. Bapak Subani, SH., M.Si selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Wiwin Yulianingsih SH, M.Kn selaku dosen pembimbing pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Bapak Eko Wahyudi, SH,.MH, Bapak Fauzul ALiwarman. SH, M.Hum , Ibu Yana indawati, SH.M.Kn, Ibu Mas Anienda T.F., SH., MH.
7. Kabag TU beserta Staf tata usaha fakultas hukum yang telah membantu penulis.
8. Bapak Soetomo SH,. Mhum terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan
9. Bapak Roely SH,. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan
10. Kedua orang tua Bapak Firmansyah Mufti dan Ibu Yuni Sudarmi, yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kakak saya beserta anak-anaknya dan juga kekasih saya yang selalu memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi tersebut.
11. Sahabat-sahabatku tercinta yang ku sayangi dan ku kasihi, Fauzan Mahbudi Agung, SH. c MH, Josua M sirait SH, Rizal Ranga Adiyatama S.Kom, Dimas Rahmat Prastika SH, Hari Cahyadi, Ardan Udika Tama, Rezky Aribowo, Zendy Wirayudha, Agung Dwi Hartono, Adinda Basuki Tunggal Wicaksono, Dedy Armanto Suryo, Vicky Gusti, Ramdhan Arosied, Prafieta ayu ramadhani, Dewi Novita, Emi Lussy kartikasari, Dea Sagita, pihak label yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, ketua segenap anggotanya club motor RBT Surabaya banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya .



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu penulis meminta maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama. Maka dari itu saran dan kritik sangatlah penulis harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga Skripsi penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,      Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Dimas Nuruddin Mufti  
NPM : 0771010003  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Agustus 1986  
Program studi : Strata1 (S1)  
Judul Skripsi :

PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN  
SURAT KUASA

ABSTRAKSI

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban seorang advokat dalam melaksanakan tugas dalam ranah hukum dan upaya hukum klien apa bila advokat melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. penulisan ini terlebih dahulu mengetahui tentang apa undang-undang yang digunakan selanjutnya pengertian tentang apakah klien, advokat, kode etik advokat, dewan kehormatan advokat dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penulisan ini guna mengetahui bagaimana pertanggung jawaban seorang advokat yang dimana telah melanggar dan faktor-faktor apa sajakah yang yang membuat seorang dapat terkena sanksi dari dewan kehormatan, jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat seorang advokat dapat dijerat atau di sanksi baik dari perundangan KUHP yang dimana mengatur tentang tindak pidana serta KUHP perdata yang mengatur keperdataan dan serta dapat pula dikenakan sanksi dari organisasi advokat yang ada dalam hal ini semua dapat aturan yang berlaku seorang advokat wajib menjalankan dan sesuai bagaimana pelaporan seorang klien agar terjadi bagaiman seorang advokat dapat memepertanggung jawabkannya . Maka dari itu setiap organisasi memberikan sanksi tegas bilamana seorang avokat telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat

Kata Kunci : Pelanggaran, Kode Etik, Advokat, Surat Kuasa

## DAFTAR ISI

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL. ....                   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN. ....             | ii  |
| KATA PENGANTAR . ....                 | iii |
| DAFTAR ISI. ....                      | iv  |
| SURAT PERNYATAAN.....                 | ix  |
| ABSTRAKSI.....                        | x   |
| BAB I PENDAHULUAN. ....               | 1   |
| 1.1 Latar Belakang. ....              | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah. ....             | 3   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....            | 4   |
| 1.4 Manfaat penelitian. ....          | 4   |
| 1.5 Kajian Pustaka. ....              | 5   |
| 1.5.1 Pengertian Etika dan Moral..... | 5   |
| 1.5.1 Etika. ....                     | 5   |
| 1.5.2 Moral.....                      | 6   |
| 1.6 Etika Profesi. ....               | 8   |
| 1.7 Pengertian Profesi.....           | 8   |
| 1.8 Profesi Hukum.....                | 10  |
| 1.9 Pelanggaran Profesi Hukum.....    | 11  |
| 1.10 Kode Etik. ....                  | 11  |
| 1.11 Sejarah Advokat. ....            | 13  |
| 1.11.1 Zaman Hindia Belanda.....      | 13  |

|   |    |
|---|----|
| 1.11.2 Zaman Balatentara Jepang.....        | 14 |
| 1.11.3 Zaman Negara Republik Indonesia..... | 16 |
| 1.12 Pengertian Advokat. ....               | 21 |
| 1.13 Pengertian Klien. ....                 | 23 |
| 1.14 Kewajiban Seorang Advokat.....         | 24 |
| 1.15 Larangan Dan Sangsi Bagi Advokat.....  | 26 |
| 1.16 Pengertian Surat Kuasa. ....           | 29 |
| 1.17 Dewan Kehormatan Advokat. ....         | 30 |
| 1.18 Metode Penelitian. ....                | 31 |
| 1.18 Pendekatan Masalah.....                | 31 |
| 1.19 Sumber Data. ....                      | 31 |
| 1.19.1 Bahan Hukum Primer.....              | 31 |
| 1.19.2 Bahan Hukum Sekunder.....            | 32 |
| 1.19.3 Bahan Hukum Tersier. ....            | 33 |
| 1.20 Tehnik Pengumpulan Data.....           | 33 |
| 1.21 Analisa Bahan Hukum.....               | 34 |
| 1.22 Sistematika Penulisan. ....            | 34 |

## **BAB II PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT DALAM PEMBUATAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SURAT KUASA. ....</b>  | <b>36</b> |
| 2.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Oleh Advokat. .... | 36        |
| 2.2 Pertanggung Jawaban Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa. ....   | 38        |

|   |    |
|---|----|
| BAB III UPAYA HUKUM KLIEN AKIBAT PELANGGARAN KODE ETIK          |    |
| OLEH ADVOKAT.....   | 54 |
| 3.1 Upaya Hukum Klien.....                                      | 54 |
| 3.1.3 Upaya Klien Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan         |    |
| Advokat .....   | 55 |
| 3.1.2 Upaya Hukum Klien Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh     |    |
| Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa. ....                       | 60 |
| 3.1.3 Upaya Hukum Klien terhadap Advokat yang wanprestasi. .... | 62 |
| BAB IV PENUTUP  |    |
| 4.1 Kesimpulan. ....  | 68 |
| 4.2 Saran. ....   | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia diuji dengan cobaan dan hukuman, jika manusia itu dalam suatu permasalahan suatu tindak pidana atau perdata maka seseorang dapat membutuhkan seseorang untuk membantu yaitu seseorang ahli yang berhubungan dengan hukum atau orang yang bekerja di bidang jasa yaitu penasihat hukum atau advokat karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendampingan dalam ranah hukum karena hak seseorang untuk mendapatkan suatu pendampingan hukum tersebut itu sudah tertulis. Disamping itu advokasi berupaya menyadarkan hak-hak masyarakat sebagai subyek hukum yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan, menegakkan perlindungan hukum sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip negara hukum, membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara pendampingan hukum atau yang dimaksudkan dengan jasa hukum.

Permasalahan pidana dalam masyarakat tidak terselasaikan akibat ketidaktahuan terhadap proses peradilan pidana, disamping itu masyarakat biasanya acuh dengan permasalahan hukum dan enggan menggunakan jasa advokat karena menganggap jasa advokat itu mahal. Anggapan bahwa kasus pidana tidak banyak memberikan keuntungan bagi pengacara turut menimbulkan komersialisasi hukum bagi masyarakat miskin yang terkena permasalahan pidana

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) secara jelas dan tegas menjamin adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang seadil-adilnya serta di perlakukan sama di hadapan hukum. Disamping itu salah satu hak dasar warga negara dalam bidang hukum ialah mendapatkan pendampingan advokat. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Dengan adanya metode yang lebih tersruktur pada sistem peradilan pidana diharapkan pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara ilmiah dan sistematis sehingga hasil yang diharapkan mewujudkan hak-hak tersangka atau terdakwa bagi penegakan keadilan dapat tercapai kearah yang lebih baik.

Relevansi bantuan hukum dalam kegiatan advokasi dalam perkara pidana bahwa metode advokasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penanganan kasus-kasus hukum pidana bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama pada kasus yang kurang mendapat perhatian serius

sehingga terkatung-katung atau tidak segera mendapat penyelesaian. Karena terkadang sebagian kecil seorang advokat mementingkan klien besar atau orang yang mempunyai uang banyak dan terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran pembuatan surat kuasa yang dimana klien atau seorang tersangka diombang ambing sehingga terjadinya pelanggaran tentang pembuatan surat kuasa yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh seorang klien dan pada jaman sekarang etika sedang menurun yang menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran kode etik.

Jika dilihat seseorang advokat harus mempunyai etika profesi dan setiap advokat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat agar setiap advokat tidak saling sikut antar advokat lain yang dapat membuat persetruan antar advokat. Setiap advokat harus mempunyai etika dalam bekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang “PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban seorang advokat terhadap pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa ?



2. Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh klien dalam penyalahgunaan surat kuasa ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapat oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui apabila terjadi adanya pelanggaran kode etik advokat yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan surat kuasa .
2. Untuk mengetahui apakah yang harus dilakukan oleh seorang klien apabila seorang advokat melakukan pelanggaran dalam pembuatan surat kuasa .

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional. Khususnya dalam etika dan kode etik dalam advokasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik.

#### 2. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah, instansi hukum yang terkait dengan advokat dalam memberikan perlindungan hukum.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1 Pengertian Etika Dan Moral

#### 1.5.1 Etika

Ketika setiap manusia dalam pergaulan agar tidak terjadi ketersinggungan dan pandangan sosial yang buruk setiap manusia dalam bergaul harus mempunyai tatakrma atau yang sering di sebut dengan etika dan etika membuat seseorang dapat menentukan bagaimana bergaul dan hidup bermasyarakat .

Etika merupakan berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti dari tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan sikap cara berfikir dan dalam bentuk jamak (ta etha) adalah adat kebiasaan<sup>1</sup>.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia etika (1) ilmu pengetahuan tentang moral. (2) peraturan tentang kelakuan yang benar dan yang salah. (3) buku tentang etika<sup>2</sup>.

Dan bisa di ambil kesimpulan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan tentang moral dan merupakan adat kebiasaan untuk mengetahui tentang kelakuan baik atau buruk manusia atau etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya.

---

<sup>1</sup> Bertens k. Etika. PT gramedia pustaka utama. Jakarta. 2002. Hal 4

<sup>2</sup> Peter Salim. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern Englishpres. Jakarta. edisi pertama 1991. etika hal 409

Nilai dan norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik-buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendak.

Dalam berkehendak setiap individu seharusnya mengerti keadaan yang dimana dalam sebuah lingkungan setiap individu hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut para pakar etika dijelaskan sebagai berikut:

Menurut James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan atau memepetimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Menurut Suhardi K Lubis dalam istilah latin, ethos atau etikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkaat moral, namun demikian apa bila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika lebih di pandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering digunakan hanya untuk menenrangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata<sup>3</sup>.

Menurut A sonny keraf etika dipahami dalam pengertian moralitas sehinggamemepunyai pengertian yang jauh lebih lebih luas. Etika dimenegerti sebagai refleksi kritis tetang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret<sup>4</sup>.

### 1.5.2 Moral

Moral menurut kamus bahasa Indonesia adalah ajaran atau pendidikan mengenai baik buruknya perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya dalam arti lain morala merupakn keadaan atau kondisi

---

<sup>3</sup> Sutrisno. Etika Profesi Hukum. upnpres. Surabaya. 2011. hal 5

<sup>4</sup> Ibid hal 6

mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah dan sebagainya<sup>5</sup>.

Moral dapat dikatakan sebagai cermin dari kehidupan individu manusia karena setiap manusia mempunyai moral yang berbeda dan perbedaan moral setiap individu manusia tersebut dinilai oleh individu yang lain sehingga penilaian tentang individu dengan individu yang lain dilihat dari moral karena moral merupakan awal dari semua kehidupan bermasyarakat.

Etika dan moral sangatlah berkaitan erat karena dalam kehidupan bermasyarakat moral dan etika dibutuhkan tanpa etika dan moral tanpa etika dan moral individu tersebut seperti individu yang hidup sebelum peradapan yang tidak mengerti apa itu moral dan etika karena itu dalam suatu pekerjaan juga perlu adanya moral dan etika profesi.

Menurut Kadir Muhammad, mengatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan “etika” adalah moral. Kata ini berasal dari bahasa latin “mos” jamaknya “mores” yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berakar dari adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani sedangkan moral berasal dari bahasa Latin<sup>6</sup>.

Orang yang memiliki moral berarti mempunyai moralitas yang baik, moralitas merupakan suatu perbuatan, tingkah laku manusia yang berhubungan dengan sopan santun yang berkenaan dengan moral maka

---

<sup>5</sup> Salim Peter. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press. Jakarta. edisi pertama 1991. moral hal 995

<sup>6</sup> Yulianingsih, Wiwin. Etika Profesi Hukum. UPN Press. Surabaya. 2011 hal 7

moral sangatlah penting bagi kehidupan manusia yang dimana sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

### 1.6 Etika Profesi

Setiap pekerjaan merupakan salah satu keinginan setiap manusia untuk memenuhi kehidupan dan menyalurkan keahlian manusia dalam dunia pendidikan yang ditempuhnya akan tetapi setiap bidang pekerjaan ada etika dalam profesi karena etika profesi merupakan salah satu alur dalam suatu bidang pekerjaan dan pembatasan apa dan bagaimana suatu bidang pekerjaan itu berjalan tanpa melanggar aturan-aturang yang sudah ada dan bila terjadi adanya penyimpangan etika profesi maka manusia tersebut akan disorot oleh atasan dan masyarakat.

Etika dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, maka etika merupakan alat untuk mengendalikan anggota masing-masing profesi. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika, dalam profesi sebagai alat pengendalian hati nurani atau kode etik atau tidak. Oleh karena itu disini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari sudut norma-norma baik maupun buruk<sup>7</sup>.

### 1.7. Pengertian Profesi

Pengertian profesi ialah suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan keahlian tertentu atau ruang lingkup yang berbeda yang terdiri dari beberapa ahli yang merupakan definisi beraneka ragam.

profesi menurut para pakar adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ibid hal 26

Menurut komarudin dalam ensiklopedi manajemen menjelaskan bahwa profesi (profession) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa<sup>8</sup>.

Menurut Frans Magbis Suseno(1991:70), profesi itu harus dibedakan dua jenis yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan
2. Hormat terhadap hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukan, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu.
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi<sup>9</sup>.

Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah :

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk sesuai dengan tuntutan profesi
2. Sadar akan kewajibannya
3. Memiliki idealisme yang tinggi<sup>10</sup>.

Maka setiap profesi seseorang setidaknya dan tidaklah lain adalah dengan atau dengan sesuai keahlian masing-masing dengan kata lain suatu pekerjaan setidaknya sesuai dengan bidangnya agar tidak adanya rasa menyesal apabila melakukan suatu pekerjaan yang bukan bidangnya walaupun terkadang suatu yang baru dalam bidang suatu pekerjaan yang bukan bidangnya maka bias di bilang tantangan baru akan tetapi semua itu merupakan harus adanya pembelajaran yang

---

<sup>8</sup> Sutrisno., Etika Profesi Hukum, upnpress, Surabaya, 2011, hal 14

<sup>9</sup> Ibid. hal 15

<sup>10</sup> Ibid hal 15

dimulai dari awal sehingga bidang pekerjaan tersebut akan tersendat atau akan menjadi berantakan. Dan apabila suatu bidang pekerjaan yang sudah sesuai dengan bidangnya maka bidang pekerjaan tersebut hendaknya ditekuni dan bertekad dalam suatu bidang pekerjaan, sadar akan kewajibannya dalam menekuni bidang pekerjaannya yang dilakukan dan juga harus memiliki idealism yang tinggi untuk menejunjung tinggi suatu bidang pekerjaan karena suatu profesi merupakan tidak hanya untuk mencari suatu nafkah akan tetapi pada diri sendiri yang telah bisa mencapai cita-cita yang diinginkan.

#### 1.8 Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan sebidang profesi yang berkaitan dengan hukum dan yang melakukan profesi ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dan profesi ini merupakan hal penting dalam kehidupan dikarenakan profesi ini membantu, mengurangi dan serta memberikan arahan tentang hukum karena hukum merupakan arahan agar masyarakat taat hukum sehingga dapat menurunkan jumlah pelanggaran-pelanggaran. Berbagai bidang tentang profesi hukum antara lain adalah :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Kehakiman
4. Pengacara.

Perlu diketahui bahwa profesi hukum ini juga terdapat etika-etika yang harus dipatuhi dan merupakan acuan agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan dan atau yang disebut dengan kode etik untuk menghindari dari pada pelanggaran maka profesi-profesi hukum sendiri perlu adanya profesionalisme pada bidangnya masing-masing, profesionalisme sendiri ada karena setiap bidang-bidang profesi hukum menjadi pagar bagi instansi-instansi hukum atau yang bisa disebut dengan instansi publik dalam pelaksanaan profesi hukum ada sumpah jabatan yang dimana sumpah tersebut sebagai ikrar agar terjadi suatu ikatan yang dimana dalam pelaksanaan tugasnya terbentuk manusia-manusia yang profesional, loyalitas dan pelindung bagi masyarakat.

### 1.9 Pelanggaran Profesi Hukum

Setiap profesi hukum tidak luput dengan kesalahan dikarenakan setiap manusia pastinya tidaklah sempurna namun pelanggaran-pelanggaran tetaplah pelanggaran maka harus diselesaikan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Setiap profesi hukum pastinya ada wadah-wadah untuk mengatasi suatu permasalahan pelanggaran karena setiap profesi hukum ada aturan-aturan tertulis yang dimana mengatur dan bagaimana untuk mengatasi suatu masalah, dan konsekuensinya dari setiap pelanggaran harus di patuhi oleh pelanggar.

### 1.10 Kode Etik

Kode etik menurut kamus bahasa Indonesia “kode” tanda yang disetujui untuk menyatakan maksud-maksud tertentu atau system



dengan tanda-tanda rahasia untuk menjamin kerahasiaan pemerintah, berita dan sebagainya<sup>11</sup>.

Sedangkan “etik” berkenaan dengan moral atau etika<sup>12</sup>.

Sedangkan kode etik merupakan asas dan norma suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku<sup>13</sup>.

Maka kode etik bisa di definisikan sekumpulan asas-asas atau norma-norma sebagai landasan yang tertulis untuk menyatakan maksud-maksud tertentu yang dimana sebagai pedoman dalam menjalankan suatu yang terlibat dalam bidang profesi hukum dan kode etik dibuat oleh sekelompok organisasi.

Kode etik profesi tidak sama dengan undang-undang hukum, seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi menerima sanksi atau denda dari induk organisasinya sedangkan pelanggaran terhadap peraturan hukum (undang-undang) di hakimi/diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara dan badan vertikalnya<sup>14</sup>.

Dengan etika profesi hukum diharapkan professional hukum mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu<sup>15</sup> :

1. Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sesibility)
2. Kemampuan untuk berfikir secara etis (ethical reasoning)
3. Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct)
4. Kemampuan untuk kepemimpinan secara etis (ethical leadership)

Dengan demikian kode etik merupakan jalan atau alur dalam kehidupan setiap profesi berjalannya sebuah profesi yang berkenaan dengan bermasyarakat yan penuh dengan kesadaran, berfikir, bertindak

---

<sup>11</sup> Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern Englishpres, Jakarta, Edisi Pertama, 1991, kode hal 751

<sup>12</sup> Ibid. etik hal 408

<sup>13</sup> Ibid kode etik hal 751

<sup>14</sup> Sutrisno, Etika Profesi Hukum, upnpress, Surabaya, 2011, hal 45

<sup>15</sup> Ibid hal 45

dan berkepemimpinan yang etis karena berkenaan dengan itu semua sebuah profesi dalam berjalannya profesi akan tidak akan menyimpang dari sebuah kesalahan.

Selain undang-undang Advokat seorang Advokat juga mengacu kepada Kode Etik karena Kode Etik merupakan penjelasan bagaimana hak dan kewajiban seorang Advokat didalam pasal 26 ayat (1) undang-undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disingkat dengan uu no 18 tahun 2003 menyebutkan:

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat”.

Maka sesuai dengan pasal dan ayat di atas organisasi yang memayungi advokat membuat sebuah aturan-aturan yang berkenaan dengan bagaimana dan seperti apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota.dan undang-undang advokat dan kode etik advokat harus dipatuhi oleh anggota organisasi advokat

### 1.11 Sejarah Advokat

#### 1.11.1 Zaman Hindia Belanda

Pada zaman Belanda untuk Hooggerechshof dan raad van justitie para pihak yang berkara diwajibkan untuk mewakili kepada seseorang procureur yaitu seseorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perijinan dari pemerintah. Kewajiban mewakilkan (verplichte procureur stelling) ini bagi penggugat dinyatakan dalam pasal 106 ayat 1 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) dan bagi tergugat dalam pasal109 B.Rv

Alasan yang paling mendasar dari peraturan zaman Belanda tersebut adalah karena proses hukum acara di pengadilan memerlukan orang yang ahli hukum untuk mengikutinya, Terbuti dalam pengadilan pidana, seseorang terdakwa bisa saja karean ingin menutupi kesalahan-kesalahan lahanya justru menjadi boomerang

bagi dirinya sendiri menjadikan proses perkara bukan hanya semakin ruwet dan menyulitkan dirinya sendiri akan dirugikan dengan beratnya hukuman bagi dirinya. Hal ini dikarenakan ia tidak mengetahui apa yang seharusnya dijawab atau tindakan apa yang tepat dalam hukum.

Berbeda dengan Hoogrechshof dan Raad van justitie serta Residentiegerecht untuk golongan erofah makan Landraad dan Appelaad sebagai wadah pengadilan pribumi ash Indonesia tidak mengharuskan adanya perwakilan dalam sidang dimuka pengadilan. Dengan kata lain, orang boleh mewakili dirinya sendiri ataupun mewakilkan kepada orang lain kuasa hukumnya. Hal ini beralasan, dikarenakan mewakilkan kepada seseorang ahli hukum (procureur) dalam jasa hukum memerlukan upagh yang mahaL Semetara tidak semua orang dapat membayar kewajiban fee kepada ahli hukum. Maka tentu saja jika diwajibkan akanlah sangat memberatkan bagi seseorang dan memungkinkan proeses hukum itu sendri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun harus di akui bahwa dengan adanya Advokat Procureur akas sangat berguna untuk membela kepentingan pihak yang berpekara di Pengadilan.

Oleh karena demikian, Pemerintah Hidia Belanda sendiri telah mengatur tetang Advokat; Procureur dalam RO: Reglement Op de Rechterlijke Organitate en het beleid des Yustite in Indonesia (St. 1847 Nr. 23 tertanggal 30 april 1847 ho. St. 1848 Nr. 57) maupun dalam pengetudan yang Bepalingen Betreffende het costum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deuwaarders yakni dalam St,1848 Nr 8. Kemudian menyangkut pengawasan Advokat - procureur disebut dalam St.1926 Nr.487.

Pengaturan tersebut dalam pasal 186 dan 192 (R O) dinyatakan bahwa seorang advokat bernama procureur harus di angkat oleh Guberbur Jendral yang telah memenuhi syarata yakni warga Negara Hindia Belanda, sarjana Hukum (Doctor atau meester in de Rechten) dan lulus ujian hukum perdata, hukum pi dana, hukum dagang dan hukum tata Negara. Pasal 192 R O menambahkan bahwa ia hanya dapat diangkat adalah setelah melakukan magang praktek.

Dengan demikian, mendaji seorang Advokat - procureur di zaman Hindia Belanda tidaklah mudah akan tetapi juga harus menenmpuh bermacam proses hingga mereka memperoleh kewenangan dalam menangani perkara-perkara<sup>16</sup>

### 1.11.2 Zaman Balatentara Jepang

Procureur di muka pengadilan dihentikan oleh balatentara Jepang yang dimulai berkuasa pada bulan Maret tahun 1942. Pada tanggal 7 Maret 1942, balatentara Jepang-pembesar balatentara Dai

---

<sup>16</sup> A.Sukaris Samardi, Advokat Litigasi Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 12

Nippon mengeluarkan Undang-Undang NO.1 untuk Jawa dan Madura. Pasal 3 menyebutkan:

"semua badan-badan pemerinta dan kekuasaannya, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan militer"

Kemudian pada bulan April 1942 terjadi pengaturan bam yang diadakan balatentara Jepang untuk semua penduduk Indonesia tentang susunan dan kekuasaan pengadilan yang disebut Tihoo Hooiin (Pengadilan Negeri) untuk tingkat satu dan Kootoo Hooiin untuk perkara tingkat kedua. Selanjutnya, pengadilan untuk pengadilan Erofah berupa Raad van Justitie dan Residentiegrecht tidak lagi ada atau dihapus. Semua mereka, baik pribumi atau erofah berlaku Tihoo Hooiin (Pengadilan Negeri) dan Kootoo Hooiin. Dengan kata lain telah disamakan dengan istilah pada zaman Belanda yakni Landardrechter dan Appelraad. Segala hukum masih sarna dengan zaman HindiaBelanda, termasuk pengangkatan Advokat-procureur.

Dengan demikian, otomatis menyangkut keharnsan adanya perwakilan hukum bagi penduduk erofah oleh seseorang procureur dimuka pengadilan tidak lagi diperlukan. Seseorang duperbolehkan secara bebas untuk mewakili dirinya atau oleh orang lain beracara di muka pengadilan. Hingga tahun 1946 bisa dikatakan kekuasaan jepang merata di Indonesia sehingga pemberlakuan asas kebebasan beracara di muka persidangan meskipun tanpa berwakil kepada seorang procureur atau ahli hukum atau advokat.

Asas kebebasan beracara tanpa harus seorang wakil ahli hukum di muka pengadilan selanjutnya menjadi pedoman dalam beracara di muka pengadilan sekarang. Terkecuali terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan. Mereka tidak boleh berpekara sendiri melaikan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya dan bagi yang sakit ingatan oleh pengampunya.

Kebebasan beracara bukan berarti tidak beresiko dimana ada kemungkinan orang yang tidak mengerti tentang hukum acara justru akan terjebak dan merugikan dirinya. Dalam dunia hukum keperdataan, ketika seseorang melakukan suatu gugatan beresiko memperoleh gugatan balasan yang sangat mungkin bagi yang tidak memperhitungkan untung dan ruginya akan justru merugikan dirinya. Proses berpekara itu sendiri tidaklah mudah, bahkan banyak

kesempatan bagi mereka yang merasa dikalahkan untuk melawan pada tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya justru banyak membuang waktu. Padahal tidak semua masalah hukum keperdataan harus diselesaikan melewati pengadilan. Demikian halnya, pembelaan hukum bagi terdakwa juga sangatlah penting, Akan tetapi menjadi boomerang jika ada suatu kesempatan dan kemampuan serta kemudahan tetapi tidak mencari pembela dirinya, setidaknya mencari celah hukum yang akan menggantungkan dirinya<sup>17</sup>

#### 1.11.3 Zaman Negara Republik Indonesia

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah Advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki landraad (pengadilan negeri) dan raad van justitie (dewan pengadilan). Para Advokat yang tercabung dalam organisasi Advokat yang disebut Balie van advocaten. Dari penelusuran sejarah wadah Advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum di Universitas Indonesia. Wadah Advokat tersebut adalah persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat PAI, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di Indonesia.

Kemudian, dalam musyawarah I kongres Advokat yang berlangsung di hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan PERADIN, sebagai pengganti P AI. Keanggotaan PERADIN bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk

---

<sup>17</sup> Ibid hal 18

memasuki PERADIN. Tiadak mengherankan kalau pada akhimya wadah-wadah profesi Advokat tumbuh di Jakarta, seperti :

1. PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum)
2. FOSKO ADVOKAT (Forum Studi dan Komunikasi Advokat)
3. HPHI (Himpunan Penasihat Hukum Indonesia)
4. BHH (Bina Bantuan Hukum)
5. PERNAJA
6. LBH KOSGORO

Pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan PERADIN dan organisasi-organisasi Advokat lain kedalam wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Pada tahun 1981, ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H, Menteri Kehakiman Ali Said, S.H, dan Jaksa Agung Ismael Saleh S.H dalam kongres PERADIN di Bandung sepakat untuk mengusulkan bahwa Advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian, pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia.

Pada tanggal 15 September 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran (sirkuler) yang berjudul PERADIN Menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal Advokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar mengikuti perkembangan. Pada tanggal 24 November 1984 PERADIN mengeluarkan lagi surat edaran kedua yang berjudul Bar Nasional yang Mandiri yang terurai dalam dua hal yaitu :

1. kata "mandiri" mengandung arti bebas, merdeka dan berdiri sendiri didalam menjalankan misinya untuk mengisi kemerdekaan, menjunjung dan turut serta dalam pembangunan bangsa dan Negara pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya dan semua itu tentu saja berdasarkan keadaan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
2. Lebih lanjut kemandirian Bar Nasional dapat dijabarkan lagi menjadi :
  - a. Berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat anggota
  - b. Keputusan itu mendapat efek social hukum, dalam arti mengikat dan harus ditaati oleh instansi penegak hukum lain, seperti polisi, hakim, jaksa dan lain-lain
  - c. Bebas dari pengaruh pihak manapun
  - d. Berdiri sama tegak dengan penegak hukum lain catur wangsa
  - e. Anggota bebas menganut agama, kepercayaan, keyakinan aliran politik yang sah, tetapi tidak merangkap pekerjaan atau jabatan yang dapat mengakibatkan keterikatan yang akhimya dapat menimbulkan conflict of interest.

Akhimya, keinginan untuk membentuk Bar Nasional Mandiri

tercapai pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk wadah tunggal Advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) namun perlu dicatat dua hal dalam pembentukan wadah tunggal IKADIN yaitu

1. Bahwa PERADIN tidak pernah dibubarkan
2. Anggota PERADIN curiga bahwa ada satu rencana diam-diam untuk menempatkan Advokat dibawah kontrol pemerintah yang dicoba untuk dilakukan dengan menepatkan pensiunan militer pada organisasi Advokat, sehingga ketua pertama IKADIN berasal dari kalangan militer dan dengan negosiasi yang sangat alot akhirnya Harjono Tjitrosoebono terpilih sebagai ketua pertama

Pemerintah tidak hanya berhenti sampai menepatkan wadah tunggal IKADIN, namun pada waktu itu berambisi untuk menyatukan seluruh komponen profesi, termasuk pengacara praktik dan pokrol bamboo. Akan tetapi rencana itu kandas dan di tentang Advokat sendiri. Pada tahun 1987 pemerintah berfikir realisti dengan mengizinkan pendirian Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah pengacara praktik.

IKADIN tidak bertahan lama karena tidak ditindak lanjuti secara konsisten oleh pendirinya terjadilah perpecahan di tubuh IKADIN sebagai akibat pengurus tidak setuju dengan beleid (kebijakan) Dewan Pimpinan Pusat IKADIN dan pada puncaknya adalah insiden pada waktu berlangsung kongres sekitar tahun 1990 di Hotel Horison ketika sebagian anggota IKADIN mundur dan mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),

Sejak peristiwa itu hingga tahun 2001, termasuk organisasi diatas, ditemukan beberapa organisasi advokat :

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)
7. Badan Pembela dan Konsultasi hukum MKGR (BPKH MKGR)
8. Bina Bantuan Hukum (BBH)
9. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro
10. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula (LKBH Trisula)

11. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH)
12. Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia
13. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
14. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
15. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
16. Perhimpunan Ahli Hukum spesialis Indonesia (PAHSINDO)
17. Asosiasi Kurato dan pengrus Indonesia (AKPI)
18. Jakarta Lawyer Club (JLC)
19. Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (PERHUMPUS)
20. Perhimpunan Pengacara Kepailitan
21. Dll

Seiring dengan berjalannya waktu, organisasi advokat tumbuh subur, sedangkan undang-undang Advokat belum ada. Karena itu niat untuk memebentuk satu Organisasi Profesi Advokat Indonesia (Indonesia Bar Association) tumbuh makin besar. Untuk itu dibuat kesepakatan bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia pada tanggal 11 Februari 2002 untuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang di deklarasikan oleh :

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAJ)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Asosiasi Kosultan Hukum Indonesia (AKHI)
7. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)

Organisasi diatas tersebut merupakan sebagai organisasi advokat pra-Undang-undang advokat. Dengan kehadiran KKAI, Forum Kerja Advokat Indonesia (FKAI) meleburkan diri ke dalam KKAI sehingga FKAI tidak ada lagi da KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. dalam perjalanan pembentukan undang-undang advokat, KKAI memberikan sumbangan yang sangat berharga dan berguna. Akhirnya setelah melalui perjalan cukup panjang Undang-Undang keAdvokatan pada tanggal 5 April 2003 diundangkan dan diberlakukan maka terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini merupakan tonggak sejarah besar dalam dunia hukum Indonesia. alasan inilah karena kehadiran undang-undang tersebut telah sangat lama dinantikan oleh para advokat sebagai payung hukum bagi para advokat dalam melakukan hak-hak dan kewajiban sebagai professional hukum. Perlu dicatat dan ditegaskan bahwa pengundang dan pemberlakuan undang-undang advokat tersebut terjadi pada waktu yang sama.

Diatas telah dipaparkan bahwa organisasi advokat Pra undang-undang advokat yang memebentuk KKAI telah memeperjuangkan pembentukan undang-undang dan di dalam undang-undang advokat tersebut ditentukan hanya ada satu organisasi advokat. Dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat dikatakan sebagai berikut :



“organisasi advokat merupakan wadah tunggal profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat”

Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (3) dikatakan :

“untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi KONSultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar modal (HKPM) and Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”

Sedangkan dalam pasal 32 ayat (4) dikatakan :

“dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini Organisasi telah terbentuk.”

Berdasarkan rumusan pasal 28 (1) Undang-Undang Advokat akan dibentuk hanya satu organisasi yang menjadi wadah dari seluruh pengacara , advokat, pengacara praktik, penasihat hukum dan konsultan hukum yang ada selama ini<sup>18</sup>

Pada tanggal 21 Desember 2004 telah dideklarasikan pendirian suatu organisasi advokat dengan nama Perhimpunan Advokat Indonesia, yang merupakan gabungan Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, AKHI, HKPM, dan APSI dan pada tanggal 15 juni 2005 telah dilakukn pembahasan rancangan anggaran dasar Peradi<sup>19</sup>

Pada tanggal 30 Mei 2008 Kongres Advokat Indonesia didirikan setidaknya oleh 2700 advokat dari 33 provinsi dan didukung oleh Ikatan Advokat Indonesia (yang dipimpin oleh teguh Samudra), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan advokat Pengacara Indonesia, dan Pengacara Syariah Indonesia<sup>20</sup>

Adanya perselisihan antara Peradi dan KAI dapat diselesaikan setelah dilakukan pertemuan berkali-kali antara ketua Peradi dengan presiden KAI persisinya setelah dilakukan perdamaian dengan penandatanganan nota kesepahaman antara ketua Peradi dan presiden KAI pada tanggal 24 juni 2010. Penandatanganan dilakukan di hadapan Mahkamah Agung yang disaksikan oleh penulis , Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan KAPOLRI dan perwakilan Jaksa Agung, inti kesepahaman sesuai dengan surat Mahkamah Agung nomot 089/KMA/VI/2010<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Harlen Sinaga V, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, 2011, Jakarta, hal 7

<sup>19</sup> Ibid hal 31

<sup>20</sup> Ibid hal 40

<sup>21</sup> Ibid hal 48

### 1.12 Pengertian Advokat

Akar kata Advokat, apabila berdasarkan pada kamus latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin, yaitu *advocatus* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan<sup>22</sup>.

Advokat atau pengacara menurut pasal 1 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 advokat berbunyi sebagai berikut:

“Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini”.

Menurut pasal 1a Kode Etik Advokat, diartikan sebagai berikut :

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”

Seorang Advokat sangatlah tidak gampang karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai UU no 18 tahun 2003 pada pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:

“(1) untuk diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Republik Indonesia
- b) Bertempat tinggal di Indonesia
- c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
- d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- f) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ters menerus pada kantor advokat

---

<sup>22</sup>Ibid hal 2

- h) Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  - i) Berlaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Jika persyaratan sudah terpenuhi oleh seorang Advokat maka setiap advokat melakukan sumpah jabatan yang terkandung dalam pasal 4 UU no 18 tahun 2003 bab II bagian dua yaitu yang isinya tentang sumpah yang dimana pada ayat (1) menjelaskan :

“sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”

Pada ayat (2) menjelaskan bagaimana sumpah atau janji yang akan di lafalkan bagi para calon-calon Advokat dan sumpah tersebut yang dimana sesuai dengan ayat (1) pelafalan disesuaikan dengan agama masing-masing calon Advokat.

Pada ayat (3) menjelaskan bahwa setelah pelafalan sumpah yang dilakukan oleh calon-calon Advokat berita cara sumpah oleh Penitera Pengadilan tinggi dikirimkan kepada Mahkamah Agung, menteri, dan Organisasi Advokat.

berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Advokat sama halnya suatu bidang profesi lain yaitu adanya sumpah dengan sumpah berarti adanya suatu keterikatan antara masyarakat, seorang

advokat dan dengan Organisasi advokat karena advokat merupakan suatu bidang profesi yang dimana membantu setiap masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang dinaungi dan diawasi oleh Organisasi Advokat dan pengangkatan seorang advokat dilakukan oleh organisasi Advokat sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 dikemukakan sebagai berikut :

“Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat”

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (PERADI) dan hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) anggaran dasar PERADI. Persyaratan utama dalam pengangkatan advokat harus dipenuhi calon advokat adalah bahwa seseorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi advokat (PERADI) serta lulus ujian yang diselenggarakan peradi<sup>23</sup>.

### 1.13 Pengertian Klien

Klien menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang mendapat bantuan hukum biasanya dari seorang pengacara atau dengan arti pelanggan, namun pelanggan diidentikan dengan penjual belian barang sehingga klien dimaksudkan kali ini adalah orang yang mendapat bantuan hukum dari pengacara.

Menurut pasal 1 UU no 18 tahun 2003 berbunyi :

“klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”.

Di dalam Kode Etik Advokat klien sama diartikan sama dengan UU no 18 tahun 2003 pada pasal 1.

---

<sup>23</sup> Ibid hal 54

#### 1.14 Kewajiban Seorang Advokat

Seorang Advokat dalam menjalankan prosesnya tidak lupa dengan kewajiban-kewajibannya sebagai advokat maka dari itu setiap kewajiban sangatlah terlebih didahulukan dari pada hak karena sebuah kewajiban merupakan awal untuk mencapai hak setiap manusia seorang Advokat dalam menjalani profesinya dalam menangani seorang klien harus tidak boleh membedakan pada pasal 18 UU 18 tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 18 UU no 18 tahun 2003 :

- “(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya”.
- “(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat”.

Selain pasal 18 UU no 18 tahun 2003. Seorang Advokat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberikan oleh klien kepada Advokat maksudnya adalah seorang Advokat harus menejunjung tinggi sebuah pekerjaan yang dimana bahwa sebuah perkara sangatlah rahasia maka seorang Advokat hendaknya menjaga kerahasiaan seorang klien ini tertuang pada pasal 19 UU No 18 tahun 2003 yang sebagai mana berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.”

- “(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”.

Pasal tersebut diatas merupakan kewajiban seorang Advokat dalam menangani dan menerima sorang Klein, akan tetapi seorang Advokat dapat menolak dalam melakukan pembelaan apabila adanya pertimbangan disesuaikan dengan keahliannya dan menyangkut dengan hati nurani. Penolakan dalam menangani suatu perkara tertuang pada pasal 3 Kode Etik Advokat yang berbunyi sebagai berikut :

- “(a) Advokat dapat menolak untuk memeberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai deangan keahliannya dan bertintangan dengan hati nuraninya , teapi tidak dapat menolak dengan alas an karena perbedaan agama, keparcayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya”.

Seorang Advokat juga harus memperjuangkan hak azasi manusia karena hak azasi merupakan hak setiap manusia yang mendasar dan seorang advokat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan serta tegaknya hukum untuk mengangkat hak azasi manusia yang dimana sudah tertuang pada pasal 3 huruf (c) Kode Etik Advokat.

Selain memenjunjung tinggi hak azasi dan tidak boleh menolak Klien serta menjaga rahasia seorang Klien seorang Advokat wajib

memiliki solidaritas diantara teman sejawat ini tertuang pada pasal 3 huruf (d) yang dimana berbunyi sebagai berikut :

“Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat”.

Dalam tugasnya Advokat juga wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang terduga melakukan suatu kesalahan yang dimana tertuang pada pasal 3 huruf (e) Kode Etik Advokat. Maka ini lah merupakan rasa solidaritas yang utuh dalam pekerjaan seorang Advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada orang atau badan hukum akan tetapi membantu teman sejawat yang terduga melakukan kesalahan.

#### 1.15 Larangan Dan Sanksi Advokat

Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun jika pelanggaran dilakukan maka seseorang yang melakukan pelanggaran akan terkena sanksi atau hukuman. dan seorang advokat jika melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi-saksi

Larangan bagi advokat antara lain adalah yang dimana tertuang pada pasal 3 huruf (c) UU no 18 tahun 2003 yang berbunyi :

“tidak sebagai pegawai negeri dan pejabat Negara”

Dimaksudkan pada pasal ini adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri tidak diperkenankan sebagai Advokat dan pejabat Negara tidak diperkenankan sebagai Advokat

Selain itu pada pasal 6 UU no 18 tahun 2003 menyebutkan alasan-alasan Advokat yang dikenai tindakan akan tetapi dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menlantarkan Kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
- c. Bersikap, bertingkah laku, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik advokat.

Dengan demikian jika seorang Advokat melanggar yang dimana sesuai dengan pasal 6 UU no 18 tahun 2003 maka setiap anggota Advokat yang melanggar akan dikenai sanksi yang dimana tertuang pada pasal 7 UU no 18 tahun 2003 yang dimana pada ayat (1) di jelaskan jenis tindakan yang akan dijatuhkan atau diberikan sanksi antara lain:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya

Pada pasal 7 ayat (2) UU no 18 tahun 2003 menjelaskan bahwa ketentuan dan jenis tingkatan perbuatan pelanggaran Advokat yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.



Pada pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimana sesuai dengan ayat (1) setiap Advokat yang di berikan sanksi dapat melakukan pembelaan diri.

Dalam pelanggaran yang diberikan kepada Advokat tidak hanya mengacu pada UU no 18 tahun 2003 akan tetapi diatur pada Kode Etik Advokat yang dimana pada pasal 16 (1) Kode Etik Advokat yang diberikan oleh Organisasi kepada Advokat hampir sama dengan pasal 7 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 yang dimana pada pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa :

“(1) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :

1. Peringatan biasa
2. Peringatan keras
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
4. Pemecatan dari keanggotaan Organisasi profesi

Pada ayat (2) pasal 16 Kode Etik Advokat menjelaskan tentang pertimbangan bagaimana sanksi yang akan diberikan dengan sifat berat atau ringannya suatu pelanggaran

Pada ayat (3) pasal 16 Kode Etik Advokat menjelaskan jika seorang Advokat yang diberikan sanksi pemberhentian sementara waktu maka Advokat tersebut dilarang menjalankan profesinya baik dalam maupun luar pengadilan

Pada ayat (4) pasal 16 Kode Etik Advokat menjelaskan apabila seorang Advokat yang diberhentikan sementara maupun dipecat dari keanggotaan maka Organisasi Advokat menyampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar anggota

dimaksudkan bahwa Advokat tersebut sudah dipecat atau di  
berhentikan sementara waktu

#### 1.16 Pengertian Surat Kuasa

Surat kuasa menurut kamus bahasa Indonesia bahwa surat kuasa adalah surat yang memuat pelimpahan kuasa untuk melakukan pengurusan sesuatu kepada seseorang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1972 menyebutkan:

“ bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Menurut Trimolija D. Soerjadi, SH

Pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dan oleh karena itu setiap saat bias di cabut kembali oleh pemberi kuasa (pasal 1814 BW). Jadi pemberian kuasa berbeda dengan perjanjian timbal balik yang memang harus di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik tidak bisa di batalkan secara sepihak (pasal 1338 BW)<sup>24</sup>.

Jenis kuasa di bagi menjadi empat yaitu<sup>25</sup>:

##### 1. Kuasa umum :

Diatur dalam pasal 1795 KUHPer yang berbunyi : titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa, dan tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa.

##### 2. Kuasa khusus :

Dalam pasal 1795 KUHPer yang berbunyi : pembagian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai

<sup>24</sup> Sungkono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Indigo, Surabaya, 2008 hal 26

<sup>25</sup> Ibid hal 27

kepentingan tertentu atau lebih agar bentuk kuasa dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa di depan pengadilan, harus memenuhi syarat dalam pasal 123 HIR.

### 3. Kuasa istimewa:

Dalam pasal 1796 KUHPer berbunyi ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan pasal 157HIR atau pasal 184 RBG dan di penuhi beberapa syarat yaitu<sup>26</sup>:

Bersifat limtatif :

Tentang lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas:

1. Untuk mendatangkan benda-benda milik pemberi kuasa atau untuk meletakkan hak tanggungan diatas benad tersebut
2. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga
3. Untuk mengucapkan sumpah penentu

Harus berbentuk akta otentik:

Menurut pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah (akte otentil/notaris)

### 4. Kuasa perantara :

Dikonstruksikan berdasarkan pada pasal 1972 KUHPer dan pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan atau makelar atau broker

Dengan demikian setiap klien dengan seorang advokat dalam

melakukan suatu dalam perjanjian dalam pemberian kuasa perlu adanya perjanjian tertulis yang di tanda tangani oleh Klien itu sendiri dan Advokat karena dalam surat kuasa seorang Klien memperbolehkan seorang advokat dalam menyelesaikan masalah perkara yang terjadi pada Klien.

## 1.17 Dewan Kehormatan Advokat

Dewan Kehormatan menurut pasal 1 Kode Etik menyebutkan sebagai berikut :

“Dewan Kehormatan adalah Lembaga atau badan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat

---

<sup>26</sup> Ibid hal 28

sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat”

Dengan demikian Badan kerhormatan advokat merupakan badan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang bertugas melakukan pengawasan, memeriksa, serta mengadili seorang Advokat yang melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat

#### 1.18. Metode Penelitian

##### 1.18. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematis hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan yang diteliti<sup>27</sup>

##### 1.19. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>27</sup> Amirrudin, Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2004 hal 31

Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi literatur dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, maka penulis hanya menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1.19.1 Bahan Hukum Primer

“ Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yurisprudensi) “<sup>28</sup>

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. KUHPerdota.
3. Kode Etik Advokat

#### 1.19.2. Bahan Hukum Sekunder

“ Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer”<sup>29</sup>, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang di ungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>28</sup> Amirrudin, Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2004  
hal 31

<sup>29</sup> Ibid, hal 32

### 1.19.3 Bahan Hukum Tersier

“ Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder”.<sup>30</sup>, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, buku.

### 1.20 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan prosedur yang dilakukan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan guna mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pustaka dari sumber utama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, koran, serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang terkait dalam materi atau permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Selanjutnya dari masalah tersebut diolah dengan metode deduktif, yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 32

### 1.21 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif.

Metode deduktif adalah pola berpikir yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan hukum secara khusus dalam teori dan prakteknya untuk diteliti sehingga analisis tersebut dapat dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi.

### 1.22 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu sebagai berikut :

Pada bab I yaitu berisi PENDAHULUAN, sebagai pengantar awal yang menguraikan gambaran umum mengenai keseluruhan penulisan ini. Berisi latar belakang permasalahan tentang dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah dengan penelitian yuridis normative dengan cara menarik asas hukum positif.

pada bab II yaitu berisi PEMBAHASAN dari rumusan masalah tentang pertanggung jawaban seorang Advokat terhadap

pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa antara Advokat dengan Klien.

pada bab III yaitu berisi PEMBAHASAN masalah dari rumusan masalah yang ke dua, yaitu mengenai Upaya apakah yang dapat ditempuh oleh klien dalam penyalahgunaan surat kuasa

pada bab IV yaitu berisi PENUTUP yang berisi kritik dan saran dari penulis mengenai kesimpulan dari pokok permasalahan yang dibahas dan terdapat beberapa saran untuk dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkompeten.